# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Penelitian

 Permasalahan sampah di negeri ini adalah masalah yang cukup besar, selain masalah kemiskinan.Terutama di kota-kota besar yang sering dihinggapi dengan masalah sampah ini.Yang pada akhirnya beujung kepada masalah yang lebih besar, yaitu masalah bencana alam. Seperti yang kita tahu beberapa kota bebesar di Indonesia sering menjadi langganan dihinggapi oleh masalah banjir seperti Jakarta, Surabaya, dan tidak terkecuali willayah kita kota Bandung.

 Kecamatan Buah Batu merupakan salah satu dari 30 Kecamatan di Kota Bandung tidak terlepas dari persoalan sampah. Hampir 48,79 mᶟ menghasilkan sampah tiap harinya yang dibuang ke temopat pembuangan sampah yang ada di wilayah Kecamatan Buah Batu. Apabila ini didiamkan tidak ada upaya melakukan pengelolaan sampah, maka kondisi sampah akan terus bertambah.

Pengelolaan sampah dengan model *open dumping* harus ditinggalkan karena dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa sistem pengelolaan sampah *open dumping*tidak ramah lingkungan serta rentah terhadap bencana longsor, sehingga perlu dilakukan pengembangan sitem dalam melakukan pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Keterpaduan di sini adalah suatu bentuk transformasi pendekatan ekosistem ke dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. (Undang-undang No 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah). Pengelolaan sampah secara terpadu berarti bahwa dalam mengelola sampah harus diperhatikan segala aspek yang terkait sebagai satu kesatuan yang terintegrasi.

Produksi sampah Kota Bandung khususnya di KecamatanBuah Batu semakin hari semakin meningkat.Di tahun 2011, produksi sampah perharinya sudah mencapai 1.500 m³.Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasana persampahan persampahan perlu didukung secara optimal.Tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk di Kota Bandung selama periode 2008-2012 mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2011 di tingkat 74%, maka pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 76%.

*Sumber : RPJMD 2014-2018.*

Kecamatan Buah Batu merupakan kawasan permukiman yang berada di Kota Bandung dengan kepadatan penduduk mencapai ± 101,920 jiwa/Ha.Kecamatan Buah Batu tedapat beberap pusat perbelanjaan dan kawasan pendidikan. Keberadaan hal tersebut tidak dapat dijaga dengan baik oleh masyarakat sekitar. Hal ini dapat dilihat dari terdapatnya sampah yang menumpuk di TPS yang disebabkan karena masyarakat yang masih tidak sadar dalam menjaga lingkungan.Hal ini semua dapat dilihat dari data yang diperoleh berdasarkan data dan dokumentasi sebagai berikut:

1. **PELAYANAN PENANAGNAN SAMPAH DIKECAMATAN BUAH BATUKOTA BANDUNG TAHUN 2016**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA DAN LOKASI TPS****(JALAN)** | **YANG MASUK (Tmp/hari)** | **DIANGKUT KE TPA (Tmp/hari** | **PERUNTUKAN** | **SUMBER SAMPAH (RM,KELURAHAN, KECAMATAN)** |
| 1 | CIPAGALO | 9.29 | 9.29 | UMUM/MASYARAKAT | KEL.CIJAURA 6 RW.KEL MARGASARI 8 RW |
| 2 | KOMPLEKCIJAURA | 1.5 | 1 | UMUM/MASYARAKAT | KOMPLEKCIJAURA |
| 3 | EMERALD TOWER | 1.2 | 1.2 | KHUSUS EMERALD TOWER/JATISARI | EMERALD TOWER |
| 4 | PASAR CIWASTRA | 24 | 24 | KHUSUS RW.11.12KEL. SEKEJATI | RW.11.12 KEL.SEKEJATI |
| 5 | CIDURIAN SELATAN | 2 | 2 | KHUSUS RW.13KEL. SEKEJATI | RW.13KEL.SEKEJATI |
| **Jumlah** | **48.79** | **48.29** |  |  |

*Sumber : Laporan Kinerja Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung tahun 2016*

1. **DOKUMENTASI PENUMPUKAN SAMPAH**

****

**Gambar 1.1**

**TPS RW. 12 Kelurahan Sekejati, Februari 2017**

****

**Gambar 1.2**

**TPS Bea dan Cukai RW. 13 Kelurahan Sekejati Febuari 2017**



**Gambar 1.3**

**Kali Cicadas baru Febuari 2017**

Permasalahan lain yang muncul di Kecamatan Buah Batu yang berkaitan dengan sistem pengelolaan sampah yaitu masih terdapat sampah rumah tangga yang berserakan di lingkunganKecamatan Buah Batu. Sampah yang berasal dari rumah tangga merupakan konstribusi yang paling besar untuk timbulan sampah, disamping itu sampah rumah tangga merupakan sampah yang berbahaya karena dikategorikan sebagai sampah B3 (Bahan Beracun Berbahaya). Apabila dibiarkan sampah tersebut akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Hal ini berdampak terhadap menurunnya kualitas lingkungan yang disebabkan oleh sampah yang tidak dikelola dengan baik dan ramah lingkungan.

Pengelolaan sampah melalui pola 3R ( *reduce, reuse dan recyle* ). Cakupan lokasi percontohan pola 3R terus meningkat dan mencapai sekitar 16% dari lokasi kelurahan di Kota Bandung.Untuk mpengelolaan sampah perkotaan relative meningkat disbanding dengan tahun lalu, dimana cakupan pelayanan pengangkutan sampah tahun 2016 berkisar 69%.

*Sumber : Laporan Kinerja Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung tahun 2016*

Permasalah Kecamatan Buah Batu menyeruak lagi diawal tahun 2013 dimana sampah menumpuk dibeberapa tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di Kecamatan Buah Batu, bahkan beberapa diantaranya menumpuk ditepi jalan karena rusaknya alat berat yang dipergunakan ditempat pembuangan sampah akhir (TPA) Cipagalo, Kecamatan Buah Batu. Akibatnya, selama hampir dua minggu, sampah di Kota Bandung tidak dapat diangkat ke TPA.

Penanganan permasalahan sampah perlu ditangani segera mungkin karena TPA Sekajati habis masa pakainya tahun 2015. Alternatif solusi penanganan sampah Kota Bandung kedepan akan dilakukan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Gedebage. Namun dalam proses pembangunan PLTSa terdapat beberapa kendala, mulai dari penolakan hingga resiko yang dikhawatirkan akan berdampak pada lingkungan cekungan Bandung. Perkembangan terakhir, pembangunan PLTSa telah melalui proses tender dan pembanguannya direncanakan dimulai di awal tahun 2014. PLTSa di Kota Bandung akan menjadi teknologi pengelolaan sampah modern pertama dan ramah lingkungan yang ada di Indonesia.

Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di kota juga menjadi aspek penting yang perlu ditingkatkan. Sarana truk sampah, motor sampah dan sarana lainnya perlu disediakan secara layak. Penyediaan TPS yang inovatif akan menjadi salah satu perhatian agar tidak mengganggu lingkungan di sekitarnya.

Karena untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah tidak cukup hanya peran pemerintah saja.Tetapi membutuhkan peran dan kontribusi masyarakat juga. Dalam menangani masalah pengelolaan sampah, sangat dibutuhkan kesadaran dan peran serta dari masyarakat.Seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.Oleh karena itu Lembaga/Intansi Non Pemerintah (*Non Government Organitation*) sagat diperlukan kontribusinya dalam menangani permasalahan pengolahan sampah di Kota Bandung khususnya di Kecamatan Buah Batu.Kecamatan Buah Batu sendiri terdapat cukup banyak Lembaga Pemerdayaan Masyarakat yang bisa membantu menangi masalah pengelolaan sampah.

Penelitian ini memfokuskan kepada apa dampak (impact) yang didapat dari peran lembaga pemerdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dampak positif yang akan dirasakan ketika peran masyarakat dapa dimaksimalkan.

 Dilihat dari beberapa permasalahan diatas maka permasalahan utama yang muncul yaitu masyarakat yang masih belum terlibat dan mampu dalam kegiatan pemberdayaan pengelolaan sampah secara terpadu. Untuk itu, yang menjadi judul penelitian ini ialah : **Analisis Peran Serta Lembaga Pemerdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Buah Batu Kota Bandung**.

## 1.2 Rumusan Masalah

 Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti mengemukakan

pernyataan masalah peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Buah Batu Kota Bandung.Selanjutnya berdasarkan pernyataan masalahtersebut dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Buah Batu Kota Bandung?
2. Apa strategi/konsep Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Buah Batu Kota Bandung?
	1. **Indentifikasi Masalah**

Beberapa permasalahan yang ingin temukan penyelesaian masalahnya. Permasalahannya diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana adapatsi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Buah Batu Kota Bandung.
2. Bagaiaman pencapaian tujuan untuk pengelolaan sampah di Kecamatan Buah Batu Kota Bandung.
3. Bagaiaman integrasi tujuan untuk pengelolaan sampah di Kecamatan Buah Batu Kota Bandung.
4. Bagaiaman pola pemeliharaan tujuan untuk pengelolaan sampah di Kecamatan Buah Batu Kota Bandung.

### 1.4 Tujuan Penelitian

1. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Buah Batu Kota Bandung.
2. Menghasilkan strategi/konsep Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Buah Batu Kota Bandung.

### Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini dapat mengembangkan khasanah keilmuan, khususnya Ilmu Kebijakan Publik yang berkaitan dengan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Buah Batu Kota Bandung.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalm masalah Pengelolaan Sampah di Kecamatan Buah Batu Kota Bandung.

## BAB II

## TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Penelitian Terdahulu

#### Hasil Penelitian Rony Ramdani

Penelitian Agil Zhega Prasetya (Mahasiswa Pasca Sarjana Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponogoro Semarang 2010) ini mengkaji pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara terpadu di Kampung Menoreh.Perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang pesat di daerah perkotaan mengakibatkan daerah pemukiman semakin luas dan padat. Peningkatan aktivitas manusia, lebih lanjut menyebabkan bertambahnya sampah. Penanganan sampah yang selama ini dilakukan belum sampai pada tahap memikirkan proses daur ulang atau menggunakan ulang sampah tetapi penanganan sampah dilakukan hanya mengangkutnya dari tempat sampah di permukiman kota dan membuangnya ke tempat pembuangan sampah akhir. Cara seperti ini kurang bisa mengatasi masalah sampah karena masih dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Permasalahan sampah timbul karena tidak seimbangnya produksi sampah dengan pengolahannya dan semakin menurun daya dukung alam sebagai tempat pembuangan sampah. Di satu pihak, jumlah sampah terus bertambah dengan laju yang cukup cepat, sedangkan di lain pihak kemampuan pengolahan sampah masih belum memadai.

 Menurut Bappeda Kota Semarang (2008), timbulan sampah di Kota Semarangsekitar 84,64% didominasi sampah yang berasal dari permukiman/rumah tangga. Sampah rumah tangga dapat dikategorikan sebagai sampah B3 (Bahan Beracun Berbahaya), karena sampah ini merupakan sisa dari kegiatan manusia sehari-hari yang dapat memberikan dampak berbahaya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mengurangi dampak berbahaya dari sampah maka diperlukan suatu alternatif pengelolaan sampah untuk mengurangi produksi sampah sehingga dampak berbahaya yang ditimbulkan oleh sampah dapat dikurangi. Salah satu alternatif tersebut adalah dengan adanya kegiatan pengelolaan persampahan secara terpadu berbasis masyarakat.

 Salah satu bentuk kegiatan pengelolaan sampah secara terpadu berbasis masyarakat dilakukan di kampung Menoreh dalam bentuk program *3R (reuse, reduce dan recycle)* melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat diharapkan dapat mengurangi volume sampah perkotaan karena dapat mengurangi sampah langsung dari sumbernya. Menurut Sumodiningrat (1999), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat diharapkan masyarakat memiliki kemampuan dan kemandirian dalam mengelola sampah mengelola sampah secara terpadu sehingga kegiatan ini dapat terus berjalan secara kontinyu.

 Tujuan penelitian ini mengkaji pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara terpadu di Kampung Menoreh. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan dengan metode analisis kualitatif deskriptif yang digunakan untuk menganalisis kondisi masyarakat, kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan pengelolaan sampah secara terpadu, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pemberdayaan pengelolaan sampah secara terpadu, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara terpadu dan upaya peningkatan pemberdayaan dalam pengelolaan sampah secara terpadu. Dalam memperoleh data adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data primer yaitu dengan observasi, visual, kuesioner dan wawancara, sedangkan teknik pengumpulan data sekunder dengan dilakukan melilui survey ke instansi-instansi terkait, untuk teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik random. Sampel random dilakukan oleh peneliti dengan mencampur subjek-subjek di dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama.

 Adapun manfaat penelitian ini adalah memberi gambaran tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah serta dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan permasalahan persampahan perkotaan Setelah dilakukan analisis maka temuan studi yang didapatkan yaitu mayoritas masyarakat tidak sadar dan mampu dalam menjalankan tugas-tugasnya seperti dalam berorganisasi, memilah sampah, mengurangi sampah (*Reduce*), memanfaatkan sampah (*Reuse*), mengolah sampah dan mengakses sumber pelayanan. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya mampu memahami dan menjalankan kegiatan ini. Hal ini menunjukan bahwa tujuan dari pemberdayaan untuk mencapai kemandirian dalam mengelola sampah secara terpadu masih belum tercapai.

Untuk itu diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara terpadu, diantaranya dengan peran pendampingan, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, peningkatan sarana persampahan dan mengembangkan akses terhadap peluang usaha. Dengan strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sampah secara terpadu.

#### Hasil Penelitian Ridwan A

Penelitian Penelitian Ridwan, Amahasiswa pasca sarjana tentang Implementasi kebijakan penanganan kebersihan kota pada tahun 2009 Penelitian ini memokuskan dalam Studi kasus pengelolaan sampah di Kotamadya Dati II Jambi. Adapun latarbelakang dari penelitian ini, peneliti membandingkan dengan negara - negara lain, investasi dalam bidang prasarana perkotaan di Indonesia masih cukup rendah ( hanya sekitar 0,4 persen dari Produk Demostik Bruto yang dialokasikan bagi prasarana umum ). Anggaran pengelolaan sampah merupakan salah satu komponen terbesar dari anggaran prasarana secara keseluruhan.

Kurangnya sumber dana untuk pembiayaan prasarana dan besarnya dana yang dibutuhkan untuk pengelolaan sampah di Indonesia mengakibatkan buruknya pelayanan di bidang ini ( Khususnya dalam ha1 tempat pembuangan sampah akhir ) dan timbul kebutuhan yang mendesak untuk mencari upaya altematif kearah peningkatan pelayanan dalam pengelolaan sampah dengan pembiayaan yang serendah mungkin.

Dalam penelitian sistim pengelolaan sampah ini pengkajian dibatasi khusus mengenai lmplementasi kebijakan penanganan kebersihan kota yakni pengelotaan sampah di kotamadya Dati I I Jambi. lmplementasi tersebut dilihat dari seberapa besar Pemda Tingkat I Kodya Jambi terutama pada Dinas kebersihan dan Pertamanan di 1 dalam melaksanakan kebijakan penanganan sampah.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pengelolaan sampah ditinjau dari variabel partisipasi masyarakat, Komunikasi antar personal, Sumber daya yang tersedia dan kemampuan sumber dana. Penelitian ini bersifat deskriftif dengan teknik analisis kualitatif oleh karena itu dalam pembahasan masalah penelitian ini dilakukan dengan cara mengambarkan dan menginterpestasikan kondisi obyek penelitian berdasarkan data faktual yang diperoleh, baik data sekunder maupun data primer hasil wawancara dengan responden.

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh memberikan beberapa kesimpulan pokok, sebagai berikut :

1. Kesadaran dan partisipasi masyarakat merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat bukan semata mata tanggung jawab dari petugas Dinas kebersihan. Dan ini merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan kemampuan pengelolaan sampah.
2. Komunikasi yang terbatas antar personal ha1 ini merupakan halangan didalam penanganan pengelolaan sampah.
3. Kemampuan Sumber daya yang tersedia terutama SDM Aparat serta Sarana dan manajemen yang tersedia terutama didalam pengelolaan sampah.
4. Kemampuan Sumber Keuangan yang terbatas merupakan hambatan didalam proses pengelolaan penanganan sampah.

Langkah-langkah kongkrit yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kotamadya Dati II Jambi :

1. Meningkatkan Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membuang sampah
2. dengan benar dan kegiatan pengumpulan sampah secara mandiri. Terus melakukan Komunikasi antar personal dilapangan.
3. Selain SDM perlu diupayakan perbaikan sarana dan prasarana serta sistim manajemen yang berkualitas.
4. Meningkatkan alokasi Pembiayaan dengan mengefektifkansistirn pemungutan retribusi kebersihan dan pengawasan.
	* 1. **Hasil Penelitian Ragil Agus Prianto**

 Penelitian Ragil Agus Prianto (Mahasiswa Strata Satu JurusanHukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2011) ini tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jombang Kota Semarang (ANALISIS SOSIO YURIDIS PASAL 28 UNDANG UNDANG NO 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH).

Produksi sampah setiap hari semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah produk dan pola konsumsi masyarakat. Hal yang harus dilakukan untuk mengatasi paningkatan volume sampah tersebut adalah dengan cara: mengurangi volume sampah dari sumbernya melalui pemberdayaan masyarakat.

 Permasalahan dalam partispasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah adalah apa saja bentuk regulasi yang terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Semarang, bagaimanakah bentuk mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penelitian tentang pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat di Jomblang Kota Semarang bertujuan untuk:

1. Memperoleh gambaran proses perencanaan dan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat,
2. Menginventarisir tantangan dan peluang dalam pengelolaan sampah rumah tangga,
3. Mengajukan usulan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

 Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud mendeskripsikan fenomena yang terjadi dilokasi penelitian dengan menggunakan analisis sosio yuridis. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

 Berdasarkan hasil penelitian, salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam upaya perbaikan lingkungan yaitu dengan memberikan sumbangan tenaga berupa kerja bakti. Selain itu, mereka juga mengadakan pertemuan warga yang dilakukan satu kali dalam sebulan, yang dihadiri oleh sebagian warga untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT. Dalam hal ini tingkat RT cenderung berbentuk partisipasi langsung sedangkan tingkat RW berbentuk partisipasi tak langsung. Warga melakukan kegiatan tersebut tanpa merasa terpaksa sama sekali. Tingkat peran serta masyarakat yang terjadi di Kelurahan Jomblang menurut kategori Arnstein dapat digolongkan pada tingkat Informing/Pemberian Informasi. Bentuk peran serta masyarakat ini dipengaruhi oleh lamanya tinggal. karena semakin banyak warga yang dikenal maka semakin kuat ikatan psikologis dengan lingkunganya

#### Relevansi dengan Hasil Penelitian Terdahulu

#### Setelah memaparkan hasil penelitian dari Agil Zhega Presetya, Ridwan A dan Ragil Agus Prianto dapat dilihat relevansi keterkaitan antara hasil penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti pada tabel berikut ini:

Table 1.1

Relevansi Hasil Penelitian Terdahulu dengan Penelitian

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Perbandingan** | **Rony Ramdany (Thesis, 2010)** | **Ridwan****(Thesis, 2009)** | **Ragil Agus Prianto** **(Thesis, 2011)** | **Hedra****(Thesis, 2016)** |
| Judul Penelitian  | “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Secara Terpadu di Kampung Menoreh | “Implementasi kebijakan penanganan kebersihan kota pada tahun 2009” | “Analisis Ssosi Yuridis PasalL 28 Undang Undang NO 18 Tahun 2008 Tentang Pengeloln Sampah” | “ Analisis Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah di Kecamatan Buah Batu Kota Bandung” |
| Tujuan Penelitian  | Mengkaji pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara terpadu di Kampung Menoreh. | Menganalisis Studi kasus pengelolaan sampah di Kotamadya Dati II Jambi. | Menganalisis permasalahan dalam partispasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah adalah apa saja bentuk regulasi yang terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Semarang. | Menganalisis Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Buah Batu Kota Bandung. |

*Sumber: Diolah peneliti, tahun 2016.*

Setelah memahami berbagai perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti, maka tampak tingkat keaslian penelitian ini, sehingga penelitian terdahulu menjadi daya dukung dan memberikan inspirasi bagi peneliti untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan orisinal.

### 2.2 KajianPustaka

Kajian literatur dilakukan terhadap literatur-literatur yang berhubungan dengan pengelolaan sampah terpadu dengan tujuan untuk membangun landasan teoritis sebagai acuan dalam penelitian. Selain mengkaji literatur-literatur yang ada, juga melakukan kajian terhadap peraturan-peraturan bidang persampahan serta konsep-konsep pengelolaan sampah yang telah ada sehingga dapat dipakai sebagai standar dalam melakukan penilaian terhadap pengelolaan sampah eksisting di Kecamtan Buah Batu Kota Bandung.

Kajian literatur dimulai dengan menjelaskan pengertian sampah, yang ditinjau berdasarkan teori-teori maupun peraturan yang berlaku serta kedudukannya. Pengelolaan sampah dalam pelaksanaannya dikontrol oleh kebijakan-kebijakan umum maupun teknis yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga arah kebijakan serta standar sistem teknik operasional pengelolaan sampah secara nasional juga merupakan bagian dari kajian literatur ini. Konsep pengelolaan sampah sistem *zero wastehome* diharapkan akan menjadi konsep yang ideal untuk dapat diimplementasikan sehingga kajian terhadap konsep tersebut menjadi bagian inti bab ini.

Rangkuman kajian literatur yang dilakukan selanjutnya digambarkan dalam bentuk diagram guna memberikan ilustrasi tentang evolusi pengelolaan sampah menuju sistem *zero wastehome*.

* + 1. **Sampah**

Pengertian Sampah Permasalahan lingkungan saat ini ada di berbagai tempat. Permasalahan itu menyangkut pencemaran, baik pencemaran tanah, air, udara dan suara. Pencemaran tersebut diakibatkan oleh aktivitas manusia. Pencemaran tanah misalnya, banyaknya sampah yang tertimbun di tempat sampah, apabila tidak ditangani dengan baik akan menurunkan tingkat kesehatan masyarakat.

Berdasarkan SK SNI Tahun 19901 (Sri Subekti, 2014:124), sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.

Menurut Hadiwiyoto (1983: ) Sampah adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat. Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah sudah diambil bagian utamanya, atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi social ekonimis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup.

Sampah adalah bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktifitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomi. E. Colink (1996:23)

Menurut kamus istilah lingkungan hidup, sampah mempunyai definisi sebagai bahan yang tidak mempunyai nilai, bahan yang tidak berharga untuk maksud biasa, pemakaian bahan rusak, barang yang cacat dalam pembikinan manufaktur, materi berkelebihan, atau bahan yang ditolak.

Menurut Tchobanoglous (1993:78) Sampah padat adalah semua barang sisa yang ditimbulkan dari aktivitas manusia dan binatang yang secara normal padat dan dibuang ketika tidak dikehendaki atau sia-sia.

 Sedangkan yang dimaksud dengan sampah perkotaan adalah sampah yang timbul di kota (tidak termasuk sampah yang berbahaya dan beracun). Definisi mengenai sampah, hal ini perlu diketahui terlebih dahulu sebelum mengenal sampah lebih dekat.

 Alex S (1999:78) Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan. Sampah merupakan bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sampah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya dari pemakai semula, atau sampah adalah sumberdaya yang tidak siap pakai.

Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan. Sampah merupakan bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sampah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya dari pemakai semula, atau sampah adalah sumber daya yang tidak siap pakai.

* + 1. **Sumber Sampah**

Sampah berasal dari kegiatan penghasil sampah seperti pasar, rumah tangga, perkotaan (kegiatan komersial/ perdagangan), penyapuan jalan, taman, atau tempat umum lainnya, dan kegiatan lain seperti dari industri dengan limbah yang sejenis sampah. Sumber dari sampah di masyarakat pada umumnya, berkaitan erat dengan penggunaan lahan dan penempatan.

Menurut G. Theisen (1993: 155) Beberapa sumber sampah dapat diklasifikasikan menjadi antara lain:

1) perumahan

2) komersil

3) institusi

4) konstruksi dan pembongkaran

5) pelayanan perkotaan

6) unit pengolahan

 7) industri

8) pertanian

Menurut Gelbert dkk (1996:56), sumber-sumber sampah adalah sebagai berikut :

1. Sampah permukiman, yaitu sampah rumah tangga berupa sisa pengolahan makanan, perlengkapan rumah tangga bekas, kertas, kardus, gelas, kain, sampah kebun/ halaman, dan lain-lain.
2. Sampah pertanian dan perkebunan, sampah kegiatan pertanian tergolong bahan organik, seperti jerami dan sejenisnya. Sebagian besar sampah yang dihasilkan selama musim panen dibakar atau dimanfaatkan untuk pupuk. Untuk sampah bahan kimia seperti pestisida dan pupuk buatan perlu perlakuan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Sampah pertanian lainnya adalah lembaran plastik penutup tempat tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan penghambat pertumbuhan gulma, namun plastik ini bisa di daur ulang.
3. Sampah dari sisa bangunan dan konstruksi gedung. Sampah yang berasal dari kegiatan pembangunan dan pemugaran gedung ini bisa berupa bahan organik maupun anorganik. Sampah organik, misalnya: kayu, bambu, triplek. Sampah anorganik, misalnya: semen, pasir, spesi, batu bata, ubin, besi dan baja, kaca dan kaleng.
4. Sampah dari perdagangan dan perkantoran. Sampah yang berasal dari daerah perdagangan seperti: toko, pasar tradisional, warung, pasar swalayan ini terdiri dari kardus, pembungkus, kertas, dan bahan organik termasuk sampah makanan dan restoran. Sampah yang berasal dari lembaga pendidikan, kantor pemerintah dan swasta biasanya terdiri dari kertas, alat tulis menulis (bolpoint, pensil, spidol dan lain-lain), toner foto copy, pita printer, kotak printer, baterai, bahan kimia dari laboratorium, pita mesin ketik, klise film, komputer rusak, dan lain-lain. Baterai bekas dan limbah bahan kimia haurs dikumpulkan secara terpisah dan harus memperoleh perlakuan khusus karena berbahaya dan beracun.
5. Sampah industri, yaitiu sampah yang berasal dari seluruh rangkaian proses produksi berupa bahan-bahan kimia serpihan atau potongan bahan, serta perlakuan dan pengemasan produk berupa kertas, kayu, plastik, atau lap yang jenuh dengan pelarut untuk pembersihan.

Konsep Gelbertini menjelaskan bahwa jenis-jenis sampah berdasarkan sumbernya. Jenis sampah bias dilihat dari beberapa sumbernya. Karena jenis sampah yang berasal dari beberapa industry yang berbeda keadaannya.Lingkungan sangat mempengaruhi terhadap sampah yang dihasilkan.

Sedangkan Hadiwiyoto (1983:99)berdasarkan tingkat penguraian, sampah pada umumnya dibagi menjadi dua macam.

* 1. Sampah organik, yaitu sampah yang mengandung senyawa-senyawa organik, karena tersusun dari unsur-unsur seperti C, H, O, N dan sebagainya. Sampah organik umumnya dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme, contohnya sisa makanan, karton, kain, karet, kulit, sampah halama.
	2. Sampah anorganik, yaitu sampah yang bahan kandungannya bersifat anorganik dan umumnya sulit terurai oleh mikroorganisme. Contohnya: kaca, kaleng, alumunium, debu, dan logam lainnya.
		1. **Pengelolaan Sampah**

Dalam pasal 12 (1) UUPPS dalam buku Alex S (1999:41-46), setiap orang diwajibkan melakukan pengelolaan atau memilah sampah dengan cara atau metode yang berwawasan lingkungan metode tersebut adalah 3R, yaitu:

1. *Reduce* (mengurangi sampah) dalam arti tidak membiarkan

tumpukan sampah yangberlebihan.

1. *Reuse* (menggunakan kembali sisa sampah yang bisa

digunakan).

3) *Recycle* (mendaur ulang).

Metode pengelolaan atau memilah sampah berbeda-beda tergantung dari banyak yang seperti jenis zat sampah, tanah untuk mengolah dan ketersediaan area di mana metode tersebut secara umum berupa:

1. *Solid waste generated*: penentuan timbulan sampah.
2. *On site handling*: penanganan di tempat atau pada sumbernya.

Tahap ini terbagi menjadi tiga, yakni:

* 1. Pengumpulan (*collecting*)
	2. Pengangkutan (*transfer and transport*)
	3. Pengolahan (*treatmen*), seperti pengubahan bentuk, pembakaran, pembuatakomposdan energy recovery (*sampah sebagai penghasil energy*).

 Pembuangan akhir: pembuangan akhir sampah harus memenuhi syaratsyarat kesehatan dan kelestarian lingkungan.

 Menurut Kodoatie (2003: 312) sampah adalah limbah atau buangan yang bersifat padat, setengah padat yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor T-13-1990, yang dimaksud dengan sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi bangunan. Sampah perkotaan adalah sampah yang timbul di kota dan tidak termasuk sampah bahan berbahaya dan beracun (B3).

 Dari menjelaskan bahwa sampah adalah limbah padat yang terdiri dari bahan organik dan anorganik (tidak termasuk limbah berbahaya dan beracun) yang dipandang oleh pemiliknya sudah tidak berguna dan telah dibuang, sehingga harus dikelola dengan baik agar tidak membahayakan lingkungan. Tata ruang diperlukan dalam pembangunan daerah agar alokasi pembangunan dapat diarahkan secara tepat sesuai dengan tuntutan perkembangan dan keterbatasan yang ada.

 Hal ini menuntut konsekuensi bahwa rencana pembangunan daerah yang berwujud rencana pengembangan tata ruang dan pengembangan sektoral harus berdampingan dan sejalan dengan perumusan kebijaksanaan strategis pembangunan daerah.(Bappeda Kota Bandung, 2004: 1).

 Menurut Kodoatie (2005: 119):

Master plan infrastruktur suatu wilayah kabupaten atau kota harus dibuat bersamaan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kabupaten/Kota, mengingat masing-masing saling mendukung dan saling mempengaruhi baik dalam rencana pengembangan, pengelolaan dan rencana tindak pembangunan. Bilamana master plan infrastruktur telah dibuat maka untuk komponenkomponen infrastruktur perlu dibuat master plannya karena masing-masing komponen infrastruktur, seperti persampahan misalnya mempunyai karakteristik berbeda-beda, baik teknis, sosial, ekonomi maupun lingkungan.

Menurut Kodoatie tata ruang diperlukan dalam pembangunan daerah agar alokasi pembangunan dapat diarahkan secara tepat sesuai dengan tuntutan perkembangan dan keterbatasan yang ada. Hal ini menuntut konsekuensi bahwa rencana pembangunan daerah yang berwujud rencana pengembangan tata ruang dan pengembangan sektoral harus berdampingan dan sejalan dengan perumusan kebijaksanaan strategis pembangunan daerah.

Menurut Kodoatie (2005: 119) Master plan infrastruktur suatu wilayah kabupaten atau kota harus dibuat bersamaan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kabupaten/Kota, mengingat masing-masing saling mendukung dan saling mempengaruhi baik dalam rencana pengembangan, pengelolaan dan rencana tindak pembangunan.

Bilamana master plan infrastruktur telah dibuat maka untuk komponenkomponen infrastruktur perlu dibuat master plannya karena masing-masing komponen infrastruktur, seperti persampahan misalnya mempunyai karakteristik berbeda-beda, baik teknis, sosial, ekonomi maupun lingkungan.

* + 1. **Konsep Pengembangan Manajemen Pengelolaan Sampah**
	1. **Arah Kebijakan Sistem Teknik Operasional**

Kebijakan manajemen pengelolaan sampah di Indonesia diarahkan pada pengembangan tingkat pelayanan untuk mencapai sasaran nasional secara bertahap. Rentang antara cakupan pelayanan yang harus dicapai secara nasional pada tahun 2015 dengan tingkat pelayanan saat ini cukup jauh, yaitu vii vii sekitar 30 – 40 %, tentunya memerlukan kesungguhan semua pihak. Kebijakan ini dapat dilaksanakan melalui berbagai strategi, yaitu:

1. Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana persampahan yang tersedia agar prasarana dan sarana yang ada dapat digunakan lebih efisien;
2. Meningkatkan kapasitas pelayanan yang berkeadilan, terencana dan terprogram sesuai kebutuhan dan prioritas;
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA ke arah Sanitary Landfill dan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan;
4. Melakukan penelitian, pengembangan dan aplikasi teknologi penanganan persampahan tepat guna dan berwawasan lingkungan.
5. **Arah Kebijakan Sistem Kelembagaan**

Arah Kebijakan di bidang kelembagaan pengelolaan sampah perkotaan diarahkan pada penguatan kapasitas lembaga pengelola persampahan. Kebijakan ini dapat dilaksanakan melalui beberapa strategi sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan bentuk dan kapasitas lembaga pengelola

 persampahan sesuai kebutuhan pelayanan;

1. Memisahkan badan regulator dan operator;
2. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi pengelolaan dan mendorong pengelolaan kolektif atas penyelenggaraan persampahan skala regional;
3. Mekanisme insentif untuk kawasan di sekitar TPA.
4. **Arah Kebijakan Sistem Pembiayaan**

Sistem pembiayaan pengelolaan sampah ke depan diarahkan pada viii viii penerapan prinsip pemulihan biaya (cost recovery) secara bertahap. Kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Perbaikan sistem tarif retribusi;
2. Mekanisme penarikan yang lebih efisien;
3. Meningkatkan prioritas pendanaan APBD untuk sektor persampahan.

**4) Arah Kebijakan Sistem Peraturan**

Suatu peraturan sebaik apapun tidak akan banyak memberikan manfaat apabila tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Untuk itu, dalam rangka menerapkan sistem peraturan dalam pengelolaan persampahan sebagaimana yang diharapkan, arah kebijakan yang ditempuh adalah upaya penegakan hukum secara sistematis dan terpadu sehingga akan berpengaruh pada perubahan perilaku masyarakat dalam pola penanganan sampah yang berwawasan lingkungan. Strategi pelaksanaan kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan:

1. Mengembangkan produk hukum sebagai landasan dan acuan dalam

 pelaksanaan pelayanan persampahan;

1. Melaksanakan sistem pengawasan dan sanksi hukum secara konsisten.

Untuk melaksanakan kebijakan penegakan hukum tersebut harus didahului dengan sosialisasi yang memadai, menyiapkan aparat penegak hukum, melaksanakan uji coba dan kemudian baru melaksanakannya secara menyeluruh.

**5) Arah Kebijakan Peran Serta Masyarakat**

 Peran serta masyarakat sangat mendukung program pengelolaan sampah (kebersihan) di suatu kota/wilayah. Peran serta masyarakat menurut Habitat dalam Panudju (1999: 71) adalah sebagai berikut:

“Participation is process of involving people; especially those directly effected, to define the problem and involve solutions with them”. (HabitatCitynet, 1997: 29)

Pada dasarnya arah kebijakan di bidang peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah ke depan meliputi tiga hal, yaitu:

1. Mengedepankan peran dan partisipasi aktif masyarakat sebagai mitra dalam pengelolaan sampah. Kebijakan ini dapat dilakukan melalui:
	1. Peningkatkan pemahaman tentang pengelolaan sampah sejak dini;
	2. Meningkatkan pembinaan peran serta/kemitraan masyarakat dan kaum

 perempuan;

1. Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya: Untuk melaksanakan kebijakan ini dapat dilakukan dengan strategi melakukan promosi dan kampanye peningkatan upaya 3R (*Reduce, Reuse, Recycle, Recovery*). Upaya-upaya ini terutama diarahkan kepada masyarakat sebagai sumber sampah, agar kesadaran, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah lebih meningkat lagi. Adapun yang dimaksud dengan prinsip 3R adalah (Ditjend Cipta Karya, 2005: 17):
	* 1. *Reduce* (mengurangi timbulan pada sumber), yaitu upaya mengurangi timbulan sampah dengan jalan sebisa mungkin melakukan minimalisasi x x barang atau material yang digunakan, karena semakin banyak material yang dipergunakan, semakin banyak sampah yang dihasilkan.
		2. *Reuse* (pakai ulang), prinsip ini menghindari pemakaian barang-barang yang disposable (sekali pakai, buang). Sebisa mungkin menggunakan barang-barang yang bisa dipakai kembali. Apabila dilakukan, hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum akhirnya menjadi sampah.
		3. *Recycle* (daur ulang) sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi, bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri nonformal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain.
2. Pengembangan kemitraan dengan swasta Kebijakan ini dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

 • Peningkatan iklim yang kondusif bagi kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat.

• Fasilitasi dan uji coba dalam pengembangan kemitraan dengan swasta.

• Melakukan fasilitasi dengan komitmen yang sungguh-sungguh.

 Arah kebijakan manajemen pengelolaan sampah modern sebagaimana.

### Analisis Peran Masyarakat

Habitat (dalam Panuju, 1999:71) mendefinisi peran serta masyarakat sebagai usaha untuk melibatkan masyarakat dalam mendefinisikan permasalahan dan usaha untuk mencari pemecahan masalah. Kunci utama dari peran serta masyarakat adalah pembentukan kerja sama berdasarkan pada kepercayaan dan keterbukaan. Peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui perseorangan maupun kelompok.

Peran serta masyarakat dalam bentuk kelompok dipandang lebih kuat dan menjanjikan. Kelompok masyarakat tersebut dapat didasarkan atas satuan wilayah, mata pencaharian, maupun adat. Menurut John M Chohen dan Uohoff dalam Parfi (2007:39) terdapat empat tipe partisipasi, yaitu:

* 1. Partisipasi dalam membuat keputusan (membuat beberapa pilihan dari banyak kemungkinan dan menyusun rencana‐rencana yang bisa dilaksanakan dan atau layak untuk dioperasikan)
	2. Partisipasi dalam implementasi (konstribusi sumber daya, administrasi, dan koordinasi kegiatan yang menyangkut tenaga kerja, biaya, dan informasi)
	3. Partisipasi dalam kegiatan yang memberikan keuntungan
	4. Partisipasi dalam kegiatan evaluasi dan keterlibatan dalam proses yang sedang berjalan

Menurut Conyers (dalam Dicky, 2003), ada 3 (tiga) alasan utama mengapa peran serta mempunyai sifat yang sangat penting , yaitu pertama, peran serta masyarakat sebagai alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, tanpa kehadirannya program pembangunan/proyek‐proyek akan mengalami kegagalan. Kedua, masyarakat akan percaya bahwa proyek dan program pembangunan, jika merasa dilibatkan dalam    proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, merupakan suatu hak demokrasi apabila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Peran serta dari sudut pandang pemerintah adalah melakukan sesuatu dengan biaya semurah mungkin, sehingga sumber dana yang terbatas dapat dipakai untuk kepentingan sebanyak mungkin. Keterlibatan seseorang untuk memberikan sumbangan dalam kelompok berbeda‐beda antara anggota masyarakat satu dengan anggota masyarakat lainnya.

Hal tersebut tergantung pada kemampuan fisik, pendidikan, ketrampilan, motivasi dan kepentingan. Bentuk partisipasi partisipasi masyarakat menurut Keith Davis (dalam Sastropoetro, 1988:16) adalah berupa: pikiran, tenaga, pikiran dan tenaga, keahlian, barang dan uang. bentuk partisipasi masyarakat tersebut dilakukan dalam berbagai cara, yaitu konsultasi biasanya dalam bentuk jasa, sumbangan spontan biasanya uang atau barang, mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya dari pihak ketiga, mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan didanai oleh Sadono   Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah, sumbangan dalam bentuk kerja, aksi massa, mengadakan pembangunan di kalangan keluarga, membangun proyek masyarakat yang bersifat otonom. Tingkat partisipasi masyarakat diperlukan untuk mengidentifikasi seberapa besar peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu dari non‐partisipasi sampai dengan kekuasaan warga. Arnstein dalam Panudju, (1999:72‐76) membagi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi 8 (delapan), yaitu: manipulasi, terapi, pemberi informasi, konsultasi, perujukan, kemitraan, pelimpahan kekuasaan, dan masyarakat yang mengontrol.

Dalam tangga partisipasi di atas, Arnstein mengelompokannya dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu sebagai berikut:

* + - 1. Tidak ada partisipasi, yang meliputi peran serta pada tingkat manipulasi dan terapi.
			2. Masyarakat hanya menerima ketentuan yang diberikan (Degrees of tokenism) yang meliputi peran serta pada informing, colsultation, dan placation.
			3. Kekuasaan masyarakat (Degrees of citizen power) yang meliputi peran serta pada tingkat partnership,  delegated power dan citizen control.

Faktor‐faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari faktor dari dalam masyarakat (internal), dan faktor dari luar masyarakat (eksternal). Faktor‐faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional adalah:

1. Faktor internal, yaitu umur, jenis pekerjaan, pendidikan, tingkat penghasilan dan lama tinggal, ikatan psikologis dengan lingkungan sekitar, tokoh masyarakat.

2. Faktor eksternal, yaitu semua stakeholder yang mempunyai pengaruh terhadap program/kegiatan pengelolaan Taman Nasional misalnya: LSM, Pemda, swasta, dll Masyarakat sekitar kawasan konservasi pada umumnya memiliki tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan yang rendah mempunyai keterbatasan dalam ikut berperan serta dalam pengelolaan taman nasional.

Masyarakat berkemauan untuk mengelola kawasan konservasi didorong oleh motivasi dan potensi yang dimiliki untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu dan kualitas lingkungan hidup dan kawasan konservasi yang ada. Hal tersebut didorong oleh: (ICEL, 2009:89)

1. Kedekatan masyarakat dengan kawasan konservasi

2. Adanya faktor kepentingan, baik secara historis, sosial‐religi, ekologi maupun ekonomi masyarakat lokal/adat,

3. Adanya kepedulian dan komitmen (seperti yang ditunjukkan oleh LSM lingkungan maupun kelompok pecinta lingkungan hidup).

Masyarakat sekitar kawasan pada umumnya mempunyai keterbatasan sehingga memerlukan dorongan dari pengelola kawasan untuk membangkitkan peran serta masyarakat. Pengembangan partisipasi masyarakat dilakukan melalui kegiatan peningkatan kesadaran konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masyarakat akan berperan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi pembangunan kehutanan. Oleh karena itu, bentuk peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan dapat berupa peran serta masyarakat dalam kegiatan penyuluhan, kegiatan perencanaan pengelolaan kawasan; kegiatan pengelolaan kawasan; dan kegiatan pengawasan kawasan

Dalam menganalisis peran masyarakat dalam menggunakan Teori fungsional struktural yang pencetusnya adalah Talcott Parson. Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme Struktural, salah satu paham atau prespektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpaadanya hubungan dengan bagian yang lainya.

Talcott Parsons (2000: 67-87) menyatakan :

“Masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat adalah merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan”.

Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme Struktural, salah satu paham atau prespektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpaadanya hubungan dengan bagian yang lainya. Kemudian perubahan yang terjadi pada satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan pada giliranya akan menciptakan perubahan pada bagian lainya.

 Perkembangan fungsionalisme didasarkan atas model perkembangan sistem organisasi yang di dapat dalam biologi, asumsi dasar teori ini ialah bahwa semua elemen harus berfungsi atau fungsional sehingga masyarakat bisa menjalankan fungsinya dengan baik.

 Masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilainilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaanperbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat adalah merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan.

Menurut pandangan ini, masalah fungsional utama adalah bagaimana cara individu memotivasi dan menetapkan individu pada posisi mereka yang “tepat”. Dalam sistem stratifikasi, hal ini dapat diturunkan menjadi dua masalah. Pertama, bagaimana cara masyarakat menanamkan kepada individu yang “tepat” itu keinginan untuk mengisi posisi.

Kedua, setelah individu berada pada posisi yang tepat, lalu bagaimana cara individu menanamkan keinginan kepada mereka untuk memenuhi persyaratan posisi mereka. Fungsi dikaitkan sebagai segala kegiatan yang diarahkan kepada memenuhi kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan dari sebuah sistem.

Ada empat persyaratan mutlak yang harus ada supaya termasuk masyarakat bisa berfungsi. Keempat persyaratan itu disebutnya AGIL. AGIL adalah singkatan dari Adaption, Goal, Attainment, Integration, dan Latency. Demi keberlangsungan hidupnya, maka masyarakat harus menjalankan fungsi-fungsi tersebut, yakni:

1. Adaptasi *(adaptation)*: sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diridengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
2. Pencapain tujuan *(goal attainment)*: sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
3. Integrasi *(integration)*: sebuah sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A,G,I,L).
4. Pemeliharaan pola*(Latency):* sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Sistem organisasi biologis dalam sistem tindakan berhubungan dengan fungsi adaptasi yakni menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan merumuskan tujuan dan mengerakan segalasumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan.

Sistem sosial berhubungan dengan fungsi integrasi dengan mengontrol komponen pembentukan masyarakat. Akhirnya sistem kebudayaan berhubungan dengan fungsi pemeliharaan pola-pola atau struktur yang ada dengan menyiapkan norma-norma dan nilai yang memitivasi mereka dalam melakukan suatu tindakan.

Sedangkan Bernard Raho (2007: 48) mengemukakan bahwa :

“Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan pada giliranya akan menciptakan perubahan pada bagian lainya. Perkembangan fungsionalisme didasarkan atas model perkembangan sistem organisasi yang di dapat dalam biologi, asumsi dasar teori ini ialah bahwa semua elemen harus berfungsi atau fungsional sehingga masyarakat bisa menjalankan fungsinya dengan baik”.

Menurut pandangan ini, masalah fungsional utama adalah bagaimana cara individu memotivasi dan menetapkan individu pada posisi mereka yang “tepat”.

Dalam sistem stratifikasi, hal ini dapat diturunkan menjadi dua masalah. Pertama, bagaimana cara masyarakat menanamkan kepada individu yang “tepat” itu keinginan untuk mengisi posisi tertentu? Kedua, setelah individu berada pada posisi yang tepat, lalu bagaimana cara individu menanamkan keinginan kepada mereka untuk memenuhi persyaratan posisi mereka.Fungsi dikaitkan sebagai segala kegiatan yang diarahkan kepada memenuhi kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan dari sebuah sistem.

Menurut Talcott Parsons dalam George Ritzer (2010: 118) mengemukakan:

Ada empat persyaratan mutlak yang harus ada supaya termasuk masyarakat bisa berfungsi. Keempat persyaratan itu disebutnya AGIL. AGIL adalah singkatan dari *Adaption, Goal, Attainment, Integration,* dan *Latency*. Demi keberlangsungan hidupnya, maka masyarakat harus menjalankan fungsi-fungsi tersebut, yakni:

1. Adaptasi (*adaptation*): sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diridengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
2. Pencapain tujuan (*goal attainment*): sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
3. Integrasi (*integration*): sebuah sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A,G,I,L).
4. Latency (*pemeliharaan pola*): sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Sistem organisasi biologis dalam sistem tindakan berhubungan dengan fungsi adaptasi yakni menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan merumuskan tujuan dan mengerakan segalasumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan.

Inti pemikiran Parsons ditemukan didalam empat sistem tindakan ciptaannya. Dengan asumsi yang dibuat Parsons dalam sistem tindakannya, berhadapan dengan masalah yang sangat diperhatikan Parsons dan telah menjadi sumber utama kritikan atas pemikirannya. Problem Hobbesian tentang keteraturan yang dapat mencegah perang sosial semua lawan semua – menurut Parsons tak dapat dijawab oleh filsuf kuno.

Parsons menemukan dalam George Ritzer(2010:123) jawaban problem didalam fungsionalisme struktural dengan asumsi sebagai berikut:6

1. Sistem memiliki properti keteraturan dan bagian-bagian yang saling tergantung.
2. Sistem cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan diri atau keseimbangan.
3. Sistem mungkin statis atau bergerak dalam proses perubahan yang teratur.
4. Sifat dasar bagian suatu sistem berpengaruh terhadap bentuk bagian-bagian lain.
5. Sistem memelihara batas-batas dengan lingkungannya.
6. Alokasi dan integrasi merupkan dua proses fundamental yang diperlukan untuk memelihara keseimbangan sistem.
7. Sistem cenderung menuju ke arah pemeliharaan keseimbangan diri yang meliputi pemeliharaan batas dan pemeliharaan hubungan antara bagian-bagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan lingkungan yang berbeda-beda dan mengendalikan kecenderungan untuk merubah sistem dari dalam.

## Kerangka Berpikir

 Penelitian ini kerangka inti yang digunakan adalah analisis peran masyarakat dalam lingkungan social.Hal ini untuk mempermudah dalam menganalis penelitian ini.

Menganalisis peran masyarakat dalam menggunakan Teori fungsional struktural yang pencetusnya adalah Talcott Parson. Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme Struktural, salah satu paham atau prespektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpaadanya hubungan dengan bagian yang lainya.

 Berdasarkan teori diatas di atas, maka kerangka berpikir peneliti disajikan dalam gambar kerangka pemikiran sebagai berikut:

Mengeaji Pemberdayaan Masysarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatn Buah Batu Kota Bandung

 **Adaptasi**

Sitem

Kepribadian

Sistem

Kultural

Sistem

Sosial

Sistem

Tindakan

 **Integrasi**

Integrasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Secara Terpadu

 **Pola Pemeliharaan**

Pola Pemeliharaan Pengelolaan Sampah Yang Baik

 **Pencapaian Tujuan**

Kesimpulan dan Rekomendasi

**Gambar 2.1**

Kerangka Berpikir

**Talcott Parson(2010:123)**

## Oprasional Variabel

Peran serta masyarakat sangat mendukung program pengelolaan sampah (kebersihan) di suatu kota/wilayah. Peran serta masyarakat menurut Habitat dalam Panudju (1999: 71) adalah sebagai berikut:

“*Participation is process of involving people; especially those directly effected, to define the problem and involve solutions with them*”. (HabitatCitynet, 1997: 29)

Pada dasarnya arah kebijakan di bidang peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah ke depan meliputi tiga hal, yaitu:

Mengedepankan peran dan partisipasi aktif masyarakat sebagai mitra dalam pengelolaan sampah. Kebijakan ini dapat dilakukan melalui:

* 1. Peningkatkan pemahaman tentang pengelolaan sampah sejak dini;
	2. Meningkatkan pembinaan peran serta/kemitraan masyarakat dan kaum

 perempuan;

Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya: Untuk melaksanakan kebijakan ini dapat dilakukan dengan strategi melakukan promosi dan kampanye peningkatan upaya 3R (*Reduce, Reuse, Recycle, Recovery*). Upaya-upaya ini terutama diarahkan kepada masyarakat sebagai sumber sampah, agar kesadaran, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah lebih meningkat lagi. Adapun yang dimaksud dengan prinsip 3R adalah (Ditjend Cipta Karya, 2005: 17):

* 1. *Reduce* (mengurangi timbulan pada sumber), yaitu upaya mengurangi timbulan sampah dengan jalan sebisa mungkin melakukan minimalisasi x x barang atau material yang digunakan, karena semakin banyak material yang dipergunakan, semakin banyak sampah yang dihasilkan.
	2. *Reuse* (pakai ulang), prinsip ini menghindari pemakaian barang-barang yang disposable (sekali pakai, buang). Sebisa mungkin menggunakan barang-barang yang bisa dipakai kembali. Apabila dilakukan, hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum akhirnya menjadi sampah.
	3. *Recycle* (daur ulang) sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi, bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri nonformal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain.

Pengembangan kemitraan dengan swasta Kebijakan ini dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

* 1. Peningkatan iklim yang kondusif bagi kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat.
	2. Fasilitasi dan uji coba dalam pengembangan kemitraan dengan swasta.
	3. Melakukan fasilitasi dengan komitmen yang sungguh-sungguh. Arah kebijakan manajemen pengelolaan sampah modern sebagaim

Dalam penelitian ini untuk menganalisis peran serta Lembaga Pemerdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah menggunakan Teori fungsional struktural yang pencetusnya adalah Talcott Parson. Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme Struktural, salah satu paham atau prespektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpaadanya hubungan dengan bagian yang lainya.

Talcott Parsons (2000: 67-87) menyatakan :

“Masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilainilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaanperbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat adalah merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan”.

Sedangkan Bernard Raho (2007: 48) mengemukakan bahwa :

“Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan pada giliranya akan menciptakan perubahan pada bagian lainya. Perkembangan fungsionalisme didasarkan atas model perkembangan sistem organisasi yang di dapat dalam biologi, asumsi dasar teori ini ialah bahwa semua elemen harus berfungsi atau fungsional sehingga masyarakat bisa menjalankan fungsinya dengan baik”.

Menurut pandangan ini, masalah fungsional utama adalah bagaimana cara individu memotivasi dan menetapkan individu pada posisi mereka yang “tepat”. Dalam sistem stratifikasi, hal ini dapat diturunkan menjadi dua masalah. Pertama, bagaimana cara masyarakat menanamkan kepada individu yang “tepat” itu keinginan untuk mengisi posisi tertentu? Kedua, setelah individu berada pada posisi yang tepat, lalu bagaimana cara individu menanamkan keinginan kepada mereka untuk memenuhi persyaratan posisi mereka.Fungsi dikaitkan sebagai segala kegiatan yang diarahkan kepada memenuhi kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan dari sebuah sistem.

Menurut Talcott Parsons dalam George Ritzer (2010: 118) mengemukakan:

Ada empat persyaratan mutlak yang harus ada supaya termasuk masyarakat bisa berfungsi. Keempat persyaratan itu disebutnya AGIL. AGIL adalah singkatan dari *Adaption, Goal, Attainment, Integration,* dan *Latency*. Demi keberlangsungan hidupnya, maka masyarakat harus menjalankan fungsi-fungsi tersebut, yakni:

1. Adaptasi (*adaptation*): sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diridengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
2. Pencapain tujuan (*goal attainment*): sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
3. Integrasi (*integration*): sebuah sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A,G,I,L).
4. Latency (*pemeliharaan pola*): sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Sistem organisasi biologis dalam sistem tindakan berhubungan dengan fungsi adaptasi yakni menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan merumuskan tujuan dan mengerakan segalasumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan.

Inti pemikiran Parsons ditemukan didalam empat sistem tindakan ciptaannya. Dengan asumsi yang dibuat Parsons dalam sistem tindakannya, berhadapan dengan masalah yang sangat diperhatikan Parsons dan telah menjadi sumber utama kritikan atas pemikirannya. Problem Hobbesian tentang keteraturan yang dapat mencegah perang sosial semua lawan semua – menurut Parsons tak dapat dijawab oleh filsuf kuno.

Parsons menemukan dalam George Ritzer(2010:123) jawaban problem didalam fungsionalisme struktural dengan asumsi sebagai berikut:6

1. Sistem memiliki properti keteraturan dan bagian-bagian yang saling tergantung.
2. Sistem cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan diri atau keseimbangan.
3. Sistem mungkin statis atau bergerak dalam proses perubahan yang teratur.
4. Sifat dasar bagian suatu sistem berpengaruh terhadap bentuk bagian-bagian lain.
5. Sistem memelihara batas-batas dengan lingkungannya.
6. Alokasi dan integrasi merupkan dua proses fundamental yang diperlukan untuk memelihara keseimbangan sistem.
7. Sistem cenderung menuju ke arah pemeliharaan keseimbangan diri yang meliputi pemeliharaan batas dan pemeliharaan hubungan antara bagian-bagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan lingkungan yang berbeda-beda dan mengendalikan kecenderungan untuk merubah sistem dari dalam.

**2.4.1Indikator yang ada dalam Structural Fungsional**

1. Sistem tindakan :

Menurut Parsons, terdapat enam lingkungan sistem tindakan yang mendorong manusia untuk bertindak. Yakni adanya realitas hakiki, sistem kultural, sistem sosial, sistem kepribadian, organisme behavorial, dan adanya lingkungan fisik-organik. Dalam lingkungan sistem tindakan, Parsons mengintegrasikan sistem dalam dua aspek, aspek pertama, setiap level yang lebih rendah menyediakan syarat, energi yang dibutuhkan dalam level yang lebih tinggi . Kedua, level yang lebih tinggi mengontrol level-level yang hirarkinya berada di bawah mereka.

Dalam lingkungan sistem tindakan, level terendah adalah lingkungan fisik dan organik yang terdiri dari unsur-unsur tubuh manusia, anatomi,dan fisiologi yang sifatnya non simbolis sedangkan level tertinggi adalah realitas hakiki

1. Sistem sosial :

Konsepsi Parsons tentang sistem sosial dimulai dari level mikro, yaitu interaksi interaksi antara ego dan alter ego, yang diartikan sebagai bentuk dasar dari sistem sosial. Parsons berpendapat bahwa ciri-ciri sistem interaksi ini hadir dalam bentuk yang lebih kompleks yang diciptakan oleh sistem sosial. Menurut Parsons, sistem sosial adalah “ Sistem yang terdiri dari beragam aktor individual yang berinteraksi satu sama lain dalam situasi yang setidaknya memiliki aspek fisik atau lingkungan, aktor yang cederung termotivasi ke arah optimisasi kepuasan dan yang hubunganna dengan situasi mereka, termasuk hubungan satu sama lain, didefinisikan dan diperantarai dalam bentuk sistem simbol yang terstruktur secara kultral dan dimiliki bersama. (Teori Sosiologi, George Ritzer , Douglas J. Goodman : 259 )

Walaupun sistem sosial identik dengan sistem interaksi, namun Parsons menganggap interaksi bukan merupakan hal terpenting dalam sistem sosial, namun ia menempatkan status peran sebagai unit yang mendasari sistem. Status peran merupakan komponen strukturl sistem sosial. Status merujuk pada posisi struktural dalam sistem sosial, dan peran adalah apa yang dilakukan aktor dalam suatu posisi . Aktor tidak dipandang menurut pemikiran dan tindakan, karena dia tidak lain hanyalah sekumpulan status dan peran. Contohnya, sosialisasi dalam masyarakat membutuhkan seseorang yang mempunyai posisi struktural yang lebih tinggi daripada masyarakat yang diberikan sosialisasi. Seorang pengamen tidak mungkin mengadakan sosialisasi bagaimana melakukan bersih desa yang seharusnya dilakukan oleh seorang kepala desa di situ.

1. Sistem Kultural

Menurut Parsons, kebudayaan merupakan kekuatan utama yang mengikat sistem tindakan .Hal ini disebabkan karena di dalam kebudayaan terdapat norma dan nilai yang harus ditaati oleh individu untuk mencapai tujuan dari kebudayaan itu sendiri. Nilai dan norma itu akan diinternalisasikan oleh aktor ke dalam dirinya sebagai suatu proses dalam sistem kepribadian agar membentuk individu sesuai yang diinginkan dalam sistem kultural. Contohnya, nilai dan norma akan mendorong individu untuk bertutur kata lebih sopan kepada orang yang lebih tua maupun orang yang dituakan.

1. Sistem Kepribadian

Sistem kepribadian tidak hanya dikendalikan oleh sistem kultural , namun juga dikendalikan oleh sistem sosial . Ini tidak berarti tidak ada tempat independen atau bebas pada sistem kepribadian , “ Pandangan Parsons adalah , kendati konteks utama struktur kepribadian berasal dari sistem sosial dan kebudayaan melalui sosialisasi , kepribadian menjadi sistem independen karena hubungannya dengan organismenya sendiri dan melaluikeunikan pengalaman hidupnya sendiri ; sistem kepribadian bukanlah sekadar epifenomena (Teori Sosiologi,George Ritzer , Douglas J. Goodman : 263)

Masyarakat adalah bagian dari kolektifitas dalam sistim sosial yang menjadi perhatian Parson. Mengutip pendapat Rocher, Parson menyatakan masyarakat sebagai :

* + 1. Kolektifitas yang relatif mencukupi kebutuhannya sendiri,
		2. Yang anggotanya mampu memenuhi seluruh kebutuhan kolektif dan individualnya,
		3. Hidup sepenuhnya dalam kerangkanya sendiri.

Parson membedakan antara empat struktur atau sub sistem dalam masyarakat menurut fungsi sistim tindakan (AGIL) yang dilaksanakan masyarakat, yaitu :

Sistim Ekonomi

Adalah sub sistim dalam masyarakat yang melaksanakan fungsi masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap ligkungan melalui tenaga kerja, produksi dan alokasi. Melalui pekerjaan ekonomi menyesuaikan diri dengan lingkungan kebutuhan masyarakat dan membantu masyarakat menyesuaikan diri dengan realitas eksternal.

1. Sistim Pemerintahan
2. Sistim pemerintahan atau sistim politik melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan mengejar tujuan-tujuan kemasyarakatan, memobilisasi aktor dan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan.
3. Sistim *Fiduciari*
4. Sistim *Fiducari* (keluarga, sekolah) menjalankan fungsi pemeliharaan pola dengan menyebarkan kultur (norma dan nilai) kepada aktor sehingga aktor menginternalisasikan kultur tersebut.
5. Komunitas Kemasyarakatan
6. Komunitas kemasyarakatan (hukum dsb.) melaksanakan fungsi integrasi yang mengkordinasikan berbagai komponen masyarakat.

Dalam mengkategorikan tindakan atau menggolongkan tipe-tipe peranan dalam sistem sosial, Parsons mengembangkan 5 buah skema yang dilihat sebagai kerangka teoritis utama dalam analisa sistem sosial. 5 buah skema itu adalah (M.Poloma, Margaret, :173-174)):

1. Affective versus Affective Neutrality, maksudnya dalam suatu hubungan sosial, orang dapat bertindak untuk pemuasan Afeksi (kebutuhan emosional) atau bertindak tanpa unsur tersebut (netral).
2. Self-orientation versus Collective-orientation, maksudnya, dalam berhubungan,  orientasinya hanya pada dirinya sendiri atau mengejar kepentingan pribadi. Sedangkan dalam hubungan yang berorientasi kolektif, kepentingan tersebut didominasi oleh kelompok.
3. Universalism versus Particularism, maksudnya, dalam hubungan yang universalistis, para pelaku saling berhubungan menurut kriteria yang dapat diterapkan kepada semua orang. Sedangkan dalam hubungan yang Partikularistis, digunakan ukuran/kriteria tertentu.
4. Quality versus Performance, maksudnya variable Quality ini menunjuk padaAscribed Status (keanggotaan kelompok berdasarkan kelahiran/bawaan lahir). Sedangkan  Performance (archievement) yang berarti prestasi yang mana merupakan apa yang telah dicapai seseorang.
5. Specificity versus Diffusness, maksudnya dalam hubungan yang spesifik, individu berhubungan dengan individu lain dalam situasi terbatas .

Penelitian ini memfokuskan pada menggunakan Teori fungsional struktural yang pencetusnya adalah Talcott Parsondalam menganalaisis Peran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan sampah di Buah Batu Kota Bandungdengan indikator sebagai berikut:

Tabel 2.1

**Operasional Variable**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konsep** | **Variabel** | **Dimensi** | **Indikator** | **Instrumen** | **Kategori** |
| Analisis Peran Masyarakat | Teori Fungsionalisme Struktural(*TalcotParsons*, *2000)* | 1.Adaptasi/ *adaptation*(*TalcotParsons dalam* George,*Ritzer 2010*) | 1) Sistem Tindakan | 1. Tindakan masyarakat yang aktif dalam lingkungan
 | 1. Baik
2. Buruk
 |
| 1. Sistem Sosial
 | 1. Sistem harus menimbulkan partisipasi yang memadai dari anggotanya.
 |
| 1. SistemKultural
 | 1. Kebudayaan merupakan kekuatan utama yang mengikat dala suatu penyesuaian.
 |
|  |  |  | 1. 4) Sistem Kepribadian
 | 1. Kepribadian seorang individu yang dapat menyesuaikan dengan lingkungan.
 |
| (dipindahkan) |
|  |
| (pindahan) |
| **Konsep** | **Variabel** | **Dimensi** | **Indikator** | **Instrumen** | **Kategori** |
|  |  | 2.Pencapain tujuan*goal attainment*(*TalcotParsons dalam* George,*Ritzer 2010*) | 1. Sistim Ekonomi
 | 1. Keadaan ekonomi suatu lingkungan masyarakat yang mendukung mencapai tujuan.
 | 1. Baik
2. Buruk
 |
| 1. Sistim Pemerintah
 | 1. Kebijakan pemerintah dala mendukung tujuan masyarakat.
 |
| 1. Sitim Keluarga/Sekolah (*Fiduciari)*
 | 1. Pendidikan yang mendukung pencapaian tujuan dalam masyarakat.
 |
| 1. Komunikasi Masyarakat
 | 1. Sistim komunikasi yang dibangun untuk bisa menjalankan tujuan.
 |
| 3. Integrasi /*integration*(*TalcotParsons dalam* George,*Ritzer 2010*) | 1. Norma-norma
 | 1. Adanya penyesuaian paham dalam norma berlaku.
 |
| (dipindahkan) |
|  |
| (pindahan) |
| **Konsep** | **Variabel** | **Dimensi** | **Indikator** | **Instrumen** | **Kategori** |
|  |  |  | 1. Nilai Sosial
2. Sanksi Sosial
3. Persainagn
 | 1. Adanya nilai-nila yang berlaku di dalam masyarakat.
2. Sanksi social terhadap penyimpangan yang berlaku
3. Persaingan yang terjadi sudah semakin berkurang
 |  |
|  |  | Pemeliharaan Pola/ Latency(*TalcotParsons dalam* George,*Ritzer 2010*) | 1. *Konsistensi*
2. *Cotinuitas*
3. *Evaluasi*
 | 1. Mempertahankan pola yag baik dalam masyarakat
2. Pola yang yang dibentuk dijalan secara terus menerus.
3. Memeprbaiki pola yang kurang baik
 |  |

***Sumber :Talcott Parsons (2000: 67-87)***

### 2.5 Proposisi

Berdasarkan kerangka berpikir dan oprasional variabel diatas, dimana teori teori fungsional struktural yang peneliti ambil dari Talcott Parsons (2000), teori fungsional struktural dipengaruhi oleh empat  variabel,  yakni:  (1) *adaptasi*,   (2) pencarian tujun, (3)*integrasi*, dan (4) pemeliharaan pola. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain, maka peneliti merumuskan proposisi sebagai berikut:

1. Keberhasilan peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah ditentukan oleh 4 (empat) operasional paremeter yaitu adaptasi lingkungan, pencarian tujuan, integrasi dan pemeliharaan pola dengan penjabaran dibawah ini :

Ada empat persyaratan mutlak yang ada supaya termasuk masyarakat bisa berfungsi. Keempat persyaratan itu disebutnya AGIL. AGIL adalah singkatan dari Adaption, Goal, Attainment, Integration, dan Latency. Demi keberlangsungan hidupnya, maka masyarakat harus menjalankan fungsi-fungsi tersebut, yakni:

1. Adaptasi (adaptation): sebuah sistem menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diridengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
2. Pencapain tujuan (goal attainment): sebuah sistem mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
3. Integrasi (integration): sebuah sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A,G,I,L).
4. Pemeliharaan pola (Latency): sebuah sistem memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Sistem organisasi biologis dalam sistem tindakan berhubungan dengan fungsi adaptasi yakni menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan merumuskan tujuan dan mengerakan segalasumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan.
5. Pengelolaaan sampah di Kecamata Buah Batu Kota Bandung ditentukan oleh strategi peran lembaga pemberdayaan masyarakat dengan penjabaran sebagai berikut :.

 Masyarakat berkemauan untuk mengelola kawasan konservasi didorong oleh motivasi dan potensi yang dimiliki untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu dan kualitas lingkungan hidup dan kawasan konservasi yang ada. Hal tersebut didorong oleh: (ICEL, 2009:89)

1. Kedekatan masyarakat dengan kawasan konservasi
2. Adanya faktor kepentingan, baik secara historis, sosial‐religi, ekologi maupun ekonomi masyarakat lokal/adat,
3. Adanya kepedulian dan komitmen (seperti yang ditunjukkan oleh LSM lingkungan maupun kelompok pecinta lingkungan hidup).